

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

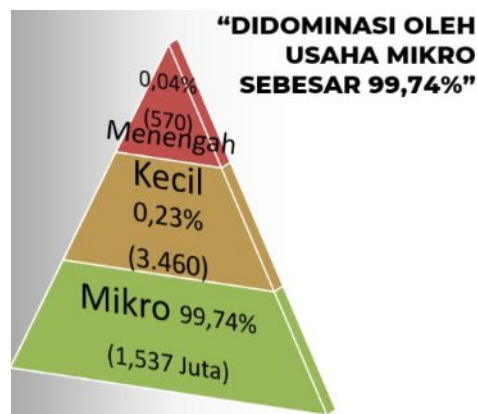
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan sektor ini tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), terdapat sekitar 66,2 juta unit UMKM di Indonesia yang secara keseluruhan memberikan kontribusi sebesar 61,1% terhadap PDB nasional. PDB dapat dipahami sebagai gambaran nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan produksi barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu.

Pada tingkat regional, keberadaan UMKM juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan perkembangan perekonomian daerah. Dinas Kominfo Jawa Timur (2024) mencatat bahwa pada Triwulan I tahun 2024, Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 25,07% terhadap perekonomian Pulau Jawa. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat sebesar 4,81%, sedangkan DKI Jakarta berada pada posisi yang lebih tinggi dengan kontribusi sebesar 29,39%. Peranan UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di suatu wilayah, juga mengalami peningkatan. Kontribusinya tercatat sebesar 57,25% pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 58,36% pada tahun 2022 dan kembali mengalami kenaikan hingga 59,18% pada tahun 2023 (Dinas Kominfo Jawa Timur, 2024).

Besarnya kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa UMKM mempunyai peranan signifikan dalam menopang aktivitas ekonomi, baik pada skala nasional maupun daerah. Pamungkas dan Bratamanggala (2025) menyatakan bahwa keberadaan UMKM turut mendukung ketahanan perekonomian melalui kemampuan sektor ini dalam menyediakan kesempatan kerja sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produk-produk lokal. Perkembangan UMKM juga tidak terlepas dari kemampuan

pelaku usaha dalam mengelola aspek keuangan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Junaidi et al. (2024) mengemukakan bahwa perilaku keuangan serta akses terhadap layanan teknologi keuangan merupakan aspek yang dapat memengaruhi perkembangan usaha UMKM.

Selain kemampuan dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan teknologi, inovasi menjadi bagian penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Ratnawati et al. (2024) dan Dika et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan serta inovasi memiliki peranan dalam meningkatkan kemampuan UMKM menghadapi persaingan dan kondisi perekonomian yang berubah-ubah. Oleh sebab itu, UMKM dapat dipandang tidak hanya sebagai sektor yang menopang perekonomian masyarakat, tetapi juga sebagai kelompok usaha yang memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, serta tuntutan persaingan usaha yang semakin kompleks.



Gambar 1.1 Data UMKM 2024

Sumber: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/jatim-penyumbang-perekonomian-terbesar-kedua-di-pulau-jawa>

Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dibandingkan dengan skala usaha lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan dan perkembangan sektor UMKM sangat berkaitan dengan kemampuan usaha mikro dalam menjaga keberlanjutan kegiatan usaha serta meningkatkan kinerjanya. Kementerian Koperasi dan UKM (2024)

mencatat bahwa usaha berskala mikro mencakup sekitar 99,74% dari keseluruhan pelaku UMKM. Pada umumnya, usaha mikro memiliki karakteristik berupa aktivitas transaksi yang berlangsung setiap hari, keterbatasan dalam memperoleh sumber permodalan, serta cakupan pemasaran yang masih banyak mengandalkan lingkungan dan jaringan lokal (Pamungkas & Bratamanggala, 2025).

Keterbatasan yang dimiliki usaha mikro tidak selalu menjadi hambatan dalam menghadapi perubahan kondisi perekonomian. Skala usaha yang relatif kecil justru memungkinkan pelaku usaha mengambil keputusan secara lebih cepat dan menyesuaikan kegiatan operasional berdasarkan kondisi pasar. Selain itu, kebutuhan biaya operasional yang cenderung lebih rendah serta kemampuan dalam menyesuaikan produk maupun strategi penjualan dengan perubahan kebutuhan konsumen menjadi faktor yang dapat membantu usaha mikro bertahan ketika terjadi tekanan ekonomi. Dengan demikian, kemampuan adaptasi dan pengelolaan sumber daya secara fleksibel menjadi salah satu kekuatan penting bagi keberlangsungan usaha mikro.

Perkembangan UMKM juga terlihat pada bidang kuliner yang menjadi salah satu subsektor dengan pertumbuhan cukup tinggi. Industri kuliner mempunyai posisi strategis dalam ekonomi kreatif karena mampu menciptakan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis produk lokal. Data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang disampaikan melalui Komdigi (2017) menunjukkan bahwa kuliner menjadi subsektor dengan kontribusi terbesar dalam ekonomi kreatif nasional, yaitu sebesar 41,69%. Posisi berikutnya ditempati oleh subsektor fesyen sebesar 18,15% dan kriya sebesar 15,70%.

Peran strategis subsektor kuliner tersebut masih terlihat dalam perkembangan ekonomi kreatif beberapa tahun berikutnya. Kementerian Ekonomi Kreatif (2025) melalui RRI (2025) menyebutkan bahwa pada tahun 2024, bidang kuliner memberikan kontribusi sekitar 42% terhadap PDB ekonomi kreatif Indonesia. Besarnya kontribusi tersebut menempatkan subsektor kuliner sebagai salah satu bidang unggulan yang memiliki prospek untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut menjadikan usaha kuliner sebagai salah satu sektor yang dapat mendukung penciptaan lapangan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 1.1 Kontribusi Subsektor Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional

No	Subsektor	Kontribusi (%)
1.	Kuliner	41,69 – 42,00
2.	Fesyen	18,15
3.	Kriya	15,70
4.	Aplikasi & Game	10,28
5.	Musik	7,26
6.	Art/Desain	6,62
	Total	100,00

Sumber: **Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)**;Kementerian Ekonomi Kreatif (2025).

Besarnya kontribusi industri kuliner dalam ekonomi kreatif mencerminkan bahwa sektor tersebut memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan produk makanan dan minuman. Aktivitas usaha kuliner turut membuka kesempatan kerja, meningkatkan nilai ekonomi dari berbagai produk lokal, serta dapat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Selain itu, perkembangan industri kuliner juga berkaitan dengan munculnya berbagai bentuk kreativitas dan inovasi yang mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi. Irjayanti dan Lord (2024) menjelaskan bahwa subsektor kuliner merupakan bidang dalam ekonomi kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah paling besar dibandingkan subsektor lainnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan usaha kuliner mempunyai posisi yang penting dalam mendukung dinamika perekonomian daerah. Potensi tersebut juga dapat ditemukan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang memiliki perkembangan usaha mikro di bidang kuliner dan berpeluang untuk terus dikembangkan sebagai salah satu sektor ekonomi daerah.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Mikro (<2 M)	Kecil (2–15 M)	Menengah (15–50 M)	Jumlah
1	Kab. Pacitan	23.216	15	2	23.233
2	Kab. Ponorogo	21.285	41	1	21.327
3	Kab. Trenggalek	21.132	7	1	21.140
4	Kab. Tulungagung	29.519	11	4	29.534
5	Kab. Blitar	34.495	13	5	34.513
6	Kab. Kediri	29.511	11	3	29.525
7	Kab. Malang	79.832	37	10	79.879
8	Kab. Lumajang	39.176	11	7	39.194
9	Kab. Jember	91.210	34	11	91.255
10	Kab. Banyuwangi	79.383	31	7	79.421
11	Kab. Bondowoso	31.215	17	1	31.233
12	Kab. Situbondo	27.849	14	1	27.864
13	Kab. Probolinggo	42.163	57	3	42.223
14	Kab. Pasuruan	27.489	41	7	27.537
15	Kab. Sidoarjo	87.445	41	18	87.504
16	Kab. Mojokerto	45.978	21	4	46.003
17	Kab. Jombang	46.320	154	36	46.510
18	Kab. Nganjuk	40.873	21	2	40.896
19	Kab. Madiun	42.783	14	2	42.799
20	Kab. Magetan	26.740	7	2	26.749
21	Kab. Ngawi	39.008	23	3	39.034
22	Kab. Bojonegoro	41.137	26	5	41.168
23	Kab. Tuban	38.284	21	3	38.308
24	Kab. Lamongan	42.471	19	7	42.497
25	Kab. Gresik	82.484	261	74	82.819
26	Kab. Bangkalan	31.893	25	2	31.920

No	Kabupaten/Kota	Mikro (<2 M)	Kecil (2–15 M)	Menengah (15–50 M)	Jumlah
27	Kab. Sampang	31.875	15	2	31.892
28	Kab. Pamekasan	31.885	9	1	31.895
29	Kab. Sumenep	38.123	33	5	38.161
30	Kota Kediri	21.190	84	12	21.286
31	Kota Blitar	18.197	20	2	18.219
32	Kota Malang	28.159	328	63	28.550
33	Kota Probolinggo	17.445	83	10	17.538
34	Kota Pasuruan	12.975	41	4	13.020
35	Kota Mojokerto	12.485	21	3	12.509
36	Kota Madiun	22.159	281	27	22.467
37	Kota Surabaya	83.415	343	97	83.855
38	Kota Batu	31.875	281	18	32.174
TOTAL		1.537.537	3.460	570	1.543.566

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (2025).

Pada tingkat provinsi, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur memperlihatkan perkembangan yang cukup kuat. Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (2025) mencatat bahwa terdapat sebanyak 1.543.566 unit UMKM yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.537.537 unit atau sekitar 99,74% merupakan usaha mikro. Sementara itu, usaha kecil berjumlah 3.460 unit atau 0,23%, sedangkan usaha menengah tercatat sebanyak 570 unit atau 0,04%.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas UMKM di Jawa Timur masih berada pada skala mikro. Dominasi tersebut sekaligus menggambarkan besarnya ketergantungan perekonomian daerah terhadap keberadaan usaha mikro sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi masyarakat dan penopang perekonomian di tingkat daerah.

Tabel 1.3 Jumlah UMKM di Kabupaten Jombang Tahun 2025 Berdasarkan Skala Usaha

Skala Usaha	Jumlah Unit Usaha	Persentase (%)
Mikro (< 2 M)	46.320	99,59%
Kecil (2–15 M)	154	0,33%
Menengah (15–50 M)	36	0,08%
Total	46.510	100%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (2025).

Kabupaten Jombang termasuk salah satu wilayah di Jawa Timur dengan perkembangan UMKM yang cukup tinggi. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 46.510 unit UMKM di Kabupaten Jombang. Sebagian besar di antaranya berada pada skala mikro, yakni 46.320 unit atau setara dengan 99,59% dari keseluruhan jumlah UMKM. Besarnya proporsi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan usaha mikro mempunyai posisi yang sangat penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Jombang.

Keberadaan usaha mikro tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan produksi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Usaha mikro mampu menciptakan kesempatan kerja, menjadi salah satu sumber penghasilan rumah tangga, serta mendukung peningkatan taraf kesejahteraan melalui aktivitas ekonomi yang dilakukan secara produktif. Tingginya jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Jombang juga dapat menggambarkan adanya minat dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan.

Meskipun demikian, usaha mikro yang berkembang di Kabupaten Jombang tidak bergerak dalam satu bidang yang sama. Pelaku usaha menjalankan kegiatan pada berbagai sektor dengan kondisi usaha, peluang pengembangan, serta hambatan yang berbeda. Keragaman tersebut dapat memengaruhi cara pelaku usaha mengelola kegiatan bisnis, menentukan strategi yang digunakan, memenuhi kebutuhan usaha, hingga menghadapi persaingan di pasar. Oleh karena itu, pemetaan usaha mikro berdasarkan bidang atau sektor kegiatan menjadi penting untuk dilakukan. Identifikasi tersebut dapat

memberikan gambaran mengenai bidang usaha yang mempunyai prospek serta potensi pengembangan yang lebih besar dan selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan fokus penelitian.

**Tabel 1.4 Distribusi UMKM Kabupaten Jombang Berdasarkan Bidang Usaha
Tahun 2023**

No	Bidang Usaha	Jumlah
1	Agrobisnis (contoh: pertanian, perikanan, peternakan, dll)	879
2	Perdagangan (contoh: toko kelontong, pranacangan, dll)	5316
3	Otomotif (contoh: bengkel, toko onderdil, dll)	292
4	Kerajinan (contoh: batik, mabelair, manik-manik, dll)	500
5	Fashion & Kecantikan (contoh: salon, butik, kosmetik, dll)	444
6	Jasa (contoh: kurir, pendidikan, transportasi, dll)	692
7	Makanan dan Minuman	938
	Total	9061

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (2023)

Perkembangan usaha mikro di Kabupaten Jombang dapat dilihat tidak hanya dari jumlah pelakunya, tetapi juga dari beragamnya sektor ekonomi yang menjadi pilihan masyarakat. Hasil pendataan potensi usaha mikro menunjukkan bahwa perdagangan menjadi bidang dengan jumlah pelaku usaha paling besar. Setelah perdagangan, bidang makanan dan minuman berada pada posisi berikutnya, kemudian disusul oleh agribisnis, jasa, kerajinan, fashion dan kecantikan, serta otomotif. Tingginya jumlah pelaku pada sektor makanan dan minuman memperlihatkan bahwa bidang tersebut mempunyai peluang yang cukup besar dalam menopang kegiatan ekonomi masyarakat dan berpotensi menjadi salah satu sektor yang berkembang di Kabupaten Jombang.

Pertumbuhan usaha makanan dan minuman tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang bersifat terus-menerus terhadap produk pangan. Kondisi tersebut menciptakan pasar yang relatif luas bagi pelaku usaha, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan intensitas persaingan. Banyaknya pelaku usaha dalam sektor yang sama mengharuskan pemilik usaha mampu mengoptimalkan sumber daya, menggunakan modal secara tepat, serta menghasilkan pembaruan produk maupun strategi usaha agar dapat mempertahankan keberlangsungannya. Oleh sebab itu, keberadaan jumlah pelaku usaha yang tinggi belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan sektor tersebut. Kemampuan menghasilkan kinerja usaha yang baik menjadi aspek yang tidak kalah penting karena berkaitan dengan pencapaian tujuan usaha, keberlanjutan kegiatan operasional, dan kemampuan menghadapi persaingan.

Business Performance dengan demikian menjadi salah satu aspek yang relevan untuk diperhatikan dalam usaha mikro sektor kuliner di Kabupaten Jombang. Kinerja usaha dapat menggambarkan kemampuan suatu usaha dalam mencapai target yang telah ditetapkan sekaligus mempertahankan keberadaan usahanya dalam jangka panjang. Pada usaha mikro, Business Performance tidak hanya berkaitan dengan hasil keuangan, tetapi juga dapat dilihat dari pencapaian aspek nonkeuangan. Beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain perkembangan penjualan, tingkat profitabilitas, efisiensi penggunaan modal kerja, dan kepuasan pelanggan.

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa kinerja usaha mikro berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya keuangan. Junaidi et al. (2024) menemukan bahwa perilaku finansial yang baik disertai pemanfaatan teknologi keuangan secara tepat dapat mendukung peningkatan kinerja usaha mikro pada sektor kuliner. Pamungkas dan Bratamanggala (2025) juga menunjukkan bahwa keberadaan sumber modal yang berasal dari jalur formal maupun nonformal dapat mendukung perkembangan usaha kecil. Sementara itu, Supramono et al. (2025) membuktikan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan dapat memperkuat hubungan antara modal dengan kinerja usaha. Berbeda dari temuan tersebut, Al-Okaily (2024) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah modal belum tentu menghasilkan performa usaha yang lebih

baik apabila pelaku usaha memiliki kemampuan manajerial dan literasi finansial yang rendah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja usaha tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber dana. Cara pelaku usaha mengelola keuangan, kemampuan menghasilkan kreativitas dalam penggunaan sumber daya, serta karakter kewirausahaan turut menentukan pencapaian usaha. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Business Performance pada usaha mikro kuliner di Kabupaten Jombang perlu mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan keputusan pembiayaan dan perilaku kewirausahaan, khususnya Financial Bootstrapping, Financial Capital, dan Entrepreneurial Orientation.

Financial Bootstrapping menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan pelaku usaha mikro ketika menghadapi kendala dalam memperoleh sumber pembiayaan. Konsep tersebut mengacu pada upaya memenuhi kebutuhan pendanaan dengan mengoptimalkan sumber daya yang relatif mudah dijangkau oleh pemilik usaha. Bentuknya dapat berupa penggunaan dana pribadi, dukungan keluarga, pertukaran barang atau jasa, maupun pengaturan waktu pembayaran kepada pemasok. Dengan cara tersebut, pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan operasional tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Dika, Rita, dan Wira (2021) menunjukkan bahwa penerapan bootstrapping dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja UMKM apabila pelaku usaha mempunyai tingkat literasi keuangan yang memadai. Temuan Alhammadi dan Rahman (2025) juga menunjukkan bahwa strategi tersebut relevan bagi pelaku usaha kuliner yang mengalami kesulitan memperoleh kredit formal sekaligus membutuhkan fleksibilitas dalam mengatur keuangannya. Selain itu, Yogatama et al. (2024) menemukan bahwa penerapan bootstrapping yang dikombinasikan dengan transformasi digital dapat membantu meningkatkan likuiditas serta ketahanan finansial usaha.

Meskipun demikian, penggunaan Financial Bootstrapping tidak selalu memberikan hasil yang sama pada setiap kondisi usaha. Pratiwi dan Setiyono (2024) menemukan bahwa penggunaan strategi bootstrapping yang tidak disertai pencatatan keuangan secara teratur belum memberikan pengaruh berarti terhadap pertumbuhan

usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan strategi tersebut sangat berkaitan dengan kemampuan pengelolaan usaha serta pemahaman keuangan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Bootstrapping dapat membantu memenuhi kebutuhan arus kas dalam jangka pendek, tetapi pengembangan kapasitas usaha dan investasi jangka panjang tetap membutuhkan dukungan Financial Capital yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa strategi bootstrapping dan ketersediaan modal keuangan dapat saling melengkapi dalam mendukung kinerja usaha mikro.

Financial Capital merupakan unsur penting lainnya dalam keberlangsungan kegiatan usaha. Modal keuangan dapat bersumber dari pihak internal, seperti tabungan pribadi dan laba yang ditahan, maupun dari sumber eksternal berupa pinjaman lembaga keuangan, koperasi, atau investor. Pamungkas dan Bratamanggala (2025) menjelaskan bahwa pembiayaan melalui sumber formal dapat membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional UMKM, sedangkan sumber pembiayaan nonformal dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kelancaran arus kas. Penelitian Pratama dan Wirawan (2025) di Bali juga memperlihatkan bahwa pengelolaan modal kerja yang tepat memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan usaha mikro.

Namun, besarnya modal yang tersedia tidak secara otomatis menjamin peningkatan kinerja usaha. Putri dan Rahmawati (2024) menunjukkan bahwa tambahan modal belum tentu memberikan hasil optimal apabila pelaku usaha tidak mampu merespons perubahan pasar. Artinya, kualitas pengelolaan modal menjadi lebih penting daripada sekadar jumlah dana yang dimiliki. Modal perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat produktif, seperti pengembangan produk, peningkatan kualitas pelayanan, maupun perluasan pasar. Pada kondisi tersebut, Entrepreneurial Orientation menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan sejauh mana modal dimanfaatkan secara optimal.

Entrepreneurial Orientation (EO) berkaitan dengan karakter pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis melalui sikap inovatif, proaktif, serta keberanian menghadapi risiko. Pelaku usaha yang mempunyai orientasi kewirausahaan tinggi cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, mencari peluang baru, dan berani mengambil keputusan untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, Financial

Capital yang tersedia dapat memberikan hasil yang lebih optimal ketika disertai dengan kemampuan kewirausahaan yang baik.

Peran Entrepreneurial Orientation terhadap kinerja usaha telah ditunjukkan oleh sejumlah penelitian. Ratnawati et al. (2024) menemukan bahwa EO dapat memperkuat hubungan antara digitalisasi dengan kinerja usaha kuliner. Novrianda et al. (2025) juga menemukan adanya kontribusi signifikan EO terhadap kinerja pemasaran UMKM di Bengkulu. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Chelliah et al. (2023) serta Saleh dan Athari (2023), yang menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan dapat memberikan pengaruh positif, baik secara langsung maupun melalui mekanisme tertentu, terhadap keberhasilan usaha baru, terutama dalam lingkungan negara berkembang.

Akan tetapi, pengaruh Entrepreneurial Orientation juga dipengaruhi oleh kondisi pendukung lainnya. Astuti (2024) menemukan bahwa EO belum menunjukkan pengaruh signifikan ketika tingkat inovasi dan dukungan modal berada pada kondisi rendah. Dalam konteks usaha kuliner di Kabupaten Jombang, keadaan serupa berpotensi muncul apabila pelaku usaha memiliki keberanian dan keinginan untuk mengembangkan bisnis, tetapi tidak mempunyai dukungan modal yang memadai atau menghadapi kendala dalam jaringan distribusi. Oleh karena itu, orientasi kewirausahaan perlu dipertimbangkan bersama dengan kemampuan memperoleh dan mengelola sumber pembiayaan. Integrasi Financial Bootstrapping, Financial Capital, dan Entrepreneurial Orientation menjadi penting dalam upaya menghasilkan Business Performance yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya research gap terkait hubungan Financial Bootstrapping, Financial Capital, dan Entrepreneurial Orientation dengan Business Performance, khususnya pada usaha mikro sektor kuliner di wilayah seperti Kabupaten Jombang. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran strategi pembiayaan alternatif dalam menjaga keberlangsungan usaha. Putra dan Santi (2022) serta Astuti (2024), misalnya, menunjukkan bahwa Financial Bootstrapping dapat mendukung likuiditas dan efisiensi penggunaan modal pada usaha kecil. Namun,

hasil tersebut belum selalu konsisten terhadap peningkatan kinerja, terutama ketika kemampuan pengelolaan keuangan pelaku usaha masih terbatas.

Yogatama et al. (2024) menunjukkan bahwa kombinasi Financial Capital dengan bootstrapping dapat meningkatkan ketahanan usaha, khususnya apabila pelaku usaha memiliki kemampuan inovasi. Sebaliknya, Sari dan Prasetyo (2023) menemukan bahwa Financial Capital belum tentu memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja ketika pelaku usaha mempunyai orientasi kewirausahaan yang rendah. Utami dan Handayani (2025) juga menyatakan bahwa Entrepreneurial Orientation belum tentu mampu meningkatkan kinerja secara optimal tanpa adanya strategi pembiayaan yang mampu menyesuaikan kebutuhan usaha. Temuan Chelliah et al. (2023) semakin memperkuat pandangan tersebut, yaitu bahwa pengaruh positif EO terhadap performa usaha kecil dapat berkurang ketika kapasitas modal dan dukungan keuangan tidak memadai.

Perbedaan temuan tersebut memperlihatkan bahwa Entrepreneurial Orientation tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor yang menentukan kinerja usaha. Orientasi kewirausahaan perlu didukung oleh keputusan pembiayaan yang tepat dan kemampuan dalam mengelola sumber modal. Pada usaha kuliner di Kabupaten Jombang, pelaku usaha yang memiliki keberanian berinovasi dan proaktif dalam mencari peluang tetap dapat mengalami hambatan apabila menghadapi keterbatasan modal atau lemahnya akses distribusi. Oleh karena itu, keterkaitan antara Financial Bootstrapping, Financial Capital, dan Entrepreneurial Orientation perlu dikaji secara lebih terintegrasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Business Performance.

Kondisi pembiayaan usaha mikro juga menjadi alasan penting untuk menggunakan perspektif Pecking Order Theory. Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro cenderung mengandalkan sumber dana yang paling mudah dijangkau, seperti tabungan pribadi, laba usaha, bantuan keluarga, atau pinjaman informal yang dapat diperoleh dalam waktu relatif singkat. Pola tersebut sejalan dengan prinsip Pecking Order Theory yang menjelaskan bahwa perusahaan pada umumnya akan mendahulukan sumber pendanaan internal sebelum menggunakan pembiayaan eksternal yang mempunyai risiko dan konsekuensi lebih besar.

Berdasarkan perspektif tersebut, Financial Bootstrapping dapat dipandang sebagai salah satu strategi yang rasional bagi usaha mikro dalam menentukan sumber pembiayaan. Keterbatasan aset yang dapat dijadikan jaminan, akses terhadap kredit formal yang belum merata, serta kebutuhan dana operasional yang harus dipenuhi secara cepat membuat sumber pembiayaan internal dan nonformal menjadi pilihan yang relevan. Meskipun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus menjelaskan bagaimana Financial Bootstrapping berhubungan dengan Financial Capital dan Entrepreneurial Orientation dalam membentuk Business Performance pada usaha mikro sektor kuliner.

Sebagian penelitian terdahulu cenderung menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah atau menggunakan objek usaha kecil dan menengah. Sementara itu, karakteristik usaha mikro memiliki kondisi yang berbeda, terutama dalam hal skala modal, kemampuan manajerial, akses terhadap lembaga keuangan, serta ketergantungan pada sumber pembiayaan pribadi dan nonformal. Oleh karena itu, penelitian yang menggabungkan ketiga variabel tersebut dalam konteks usaha mikro kuliner di Kabupaten Jombang memiliki relevansi akademik untuk memperluas pemahaman mengenai keputusan pembiayaan dan kinerja usaha berdasarkan Pecking Order Theory.

Novelty penelitian ini terletak pada penyatuan Financial Bootstrapping, Financial Capital, dan Entrepreneurial Orientation dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan Business Performance usaha mikro kuliner dengan menggunakan perspektif Pecking Order Theory. Model tersebut memberikan sudut pandang bahwa pencapaian kinerja usaha tidak hanya berkaitan dengan jumlah modal yang tersedia, tetapi juga dengan bagaimana pelaku usaha memperoleh, mengatur, dan menggunakan sumber pembiayaan serta bagaimana karakter kewirausahaan memengaruhi keputusan tersebut.

Dalam penelitian ini, Financial Bootstrapping tidak hanya ditempatkan sebagai pilihan yang muncul akibat sulitnya memperoleh pembiayaan formal. Strategi tersebut juga dipandang sebagai bentuk kemampuan adaptasi pelaku usaha dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dalam kerangka Pecking Order Theory, bootstrapping dapat menggambarkan proses pemanfaatan sumber pembiayaan internal

dan nonformal sebelum pelaku usaha menggunakan sumber pendanaan eksternal. Efektivitas strategi tersebut selanjutnya dapat berkaitan dengan Entrepreneurial Orientation, karena pelaku usaha yang lebih inovatif, proaktif, dan berani mengambil risiko memiliki kecenderungan berbeda dalam mengelola sumber daya serta mencari alternatif pembiayaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan Pecking Order Theory pada konteks usaha mikro, khususnya bidang kuliner di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan mikro dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan akses pembiayaan, penguatan kemampuan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas kewirausahaan. Strategi tersebut diharapkan dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro sehingga mampu mendukung peningkatan Business Performance dan keberlanjutan usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin dinamis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Bootstrapping* berpengaruh terhadap *Business Performance* usaha mikro kuliner di Kabupaten Jombang?
2. Apakah *Financial Capital* berpengaruh terhadap *Business Performance* usaha mikro kuliner di Kabupaten Jombang?
3. Apakah *Entrepreneurial Orientation* berpengaruh terhadap *Business Performance* usaha mikro kuliner di Kabupaten Jombang?
4. Apakah *Financial Bootstrapping*, *Financial Capital*, dan *Entrepreneurial Orientation* secara simultan berpengaruh terhadap *Business Performance* usaha mikro kuliner di Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Bootstrapping* terhadap *Business Performance* usaha mikro kuliner di Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Capital* terhadap *Business Performance* usaha mikro kuliner di Kabupaten Jombang.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Entrepreneurial Orientation* terhadap *Business Performance* usaha mikro kuliner di Kabupaten Jombang.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Bootstrapping*, *Financial Capital*, dan *Entrepreneurial Orientation* secara simultan terhadap *Business Performance* usaha mikro kuliner di Kabupaten Jombang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan dan kewirausahaan, dengan memperkuat teori mengenai hubungan antara **Financial Bootstrapping**, **Financial Capital**, dan **Entrepreneurial Orientation** terhadap **Business Performance** pada usaha mikro.

b. Validasi Empiris

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang dapat memperkaya literatur akademik terkait strategi pendanaan non-formal (*bootstrapping*) serta peran orientasi kewirausahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis.

c. **Referensi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan variabel lain yang berhubungan, seperti **Financial Literacy**, **Innovation Capability**, maupun **Market Orientation**, dalam memengaruhi *Business Performance*.

2. Manfaat Praktis

a. **Bagi Pelaku Usaha Mikro (UMK) Kuliner di Jombang**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan modal dan penerapan *strategi bootstrapping* dalam menghadapi keterbatasan sumber pendanaan, serta meningkatkan orientasi kewirausahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha kuliner.

b. **Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun lembaga keuangan dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif, misalnya peningkatan akses pembiayaan inklusif serta pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro kuliner.

c. **Bagi Akademisi dan Praktisi Bisnis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan strategi bisnis berbasis inovasi keuangan dan orientasi kewirausahaan,

sehingga mampu memperkuat daya saing UMK kuliner di tingkat lokal maupun nasional.